

Hujan Deras Menggyur Bogor, 3 Pohon Tumbang

BOGOR (IM)- Hujan yang menggyur wilayah Kota Bogor, menumbangkan 3 pohon. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian tersebut, namun sempat membuat lalu lintas terhambat.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Teofilo Patrocinio Freitas, mengatakan, lokasi pohon tumbang pertama berada di Jalan Batu Tulis sekira pukul 04.00 WIB. Pohon setinggi 15 meter tumbang di jalan tersebut.

"Pohon ini tumbang lalu menghalangi semua akses jalan bagi kendaraan yang akan melintas juga menimpa kabel listrik milik PLN," kata Teo dalam keterangannya, Minggu (12/2).

Lokasi kedua yakni berada di Jalan Budi Agung sekira

pukul 02.00 WIB. Di lokasi ini, pohon yang tumbang berjenis kersen dengan tinggi sekitar 20 meter.

"Pohon ini tumbang menghalangi sebagian akses jalan bagi kendaraan dan pejalan kaki," jelasnya.

Untuk lokasi terakhir, tambah Teo, pohon tumbang terjadi di Jalan Raya Pajajaran sekira pukul 23.20 WIB. Pohon yang tumbang jenis ceri dengan tinggi sekitar 8 meter dengan diameter 30 centimeter dan sempat menghalangi lalu lintas kendaraan yang melintas. "Dalam kejadian pohon tumbang ini tidak ada korban dan telah selesai penganganan," tutupnya. ● **gio**

Pemkab Bogor Kejar Target Kinerja Sampai Tahun 2024

BOGOR (IM)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor pada tahun 2024 fokus melanjutkan pencapaian target daerah. Bentuk pencapaian target ini, upaya Pemkab Bogor menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2024, di Ruang Serbaguna I, Sekretariat Daerah, Cibinong, Jumat (10/2) lalu.

Hadir pada forum tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin, unsur Forkopimda Kabupaten Bogor, beserta jajaran Pemkab Bogor lainnya. Forum konsultasi publik ini dihadiri pula secara virtual oleh para stakeholder pembangunan.

Target pencapaian daerah yang akan dilanjutkan di antaranya laju pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, PDRB, angka kemiskinan, pengangguran, dan yang lainnya untuk bersinergi dan mendukung pencapaian target makro Provinsi Jawa Barat dan nasional.

Mewakili Plt. Bupati Bogor, Sekda Kabupaten Bogor, Burhanudin meminta penyusunan RKPD tahun 2024 dilakukan secara partisipatif, bersifat bottom-up, dan seluruh perangkat daerah fokus pada perencanaan teknokratik yang dikombinasikan dengan usulan masyarakat, agar tepat sasaran.

"Kita harus berupaya meningkatkan layanan publik, meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan," kata Burhanudin. Burhanudin mengung-

kapkan, luasnya wilayah dan jumlah penduduk yang terus bertambah, menjadikan tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Bogor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan dasar, pelayanan wajib non pelayanan dasar, serta urusan pilihan lainnya.

"Saya minta agar usulan program kegiatan dalam forum ini, dapat fokus dan menitik kepada penyelesaian masalah dan isu strategi, agar pemanfaatan belanja daerah yang terbatas dapat dioptimalkan," ujar Burhanudin.

Selanjutnya, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mengatakan, banyak program-program yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang dijabarkan dalam program Pancakarsa.

Di dalamnya ada Bogor Sehat, Bogor Cerdas, Bogor Membangun, Bogor Maju, dan Bogor Berkeadilan. "Menyelesaikan program-program yang tertuang pada RPJMD yang akan berakhir pada tahun 2023 bukanlah perkara mudah. Ini tantangan besar bagi kepala daerah untuk merealisasikan, mengimplementasikan, dan menyelesaikan visi dan misi," kata Rudy.

Rudy menerangkan, acara itu merupakan acara yang paling penting, hari ini adalah momentum kita sama-sama memberikan saran, memberikan masukan untuk menyusun RKPD tahun 2024. Karena RKPD tahun 2024 adalah pedoman bagi Penjabat (PJ) Bupati Bogor melaksanakan program-program dan roda pemerintahan di Kabupaten Bogor. ● **gio**

Program PTSL Tingkatkan Nilai Ekonomis Lahan



Sekda Kabupaten Bogor, Burhanudin tengah paparkan program PTSL.

BOGOR (IM)- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin memberi penjelasan tentang manfaat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bagi masyarakat. Hal ini dikemukakan Sekda, di Ruang Rapat I, Sekretariat Daerah, Cibinong, Jumat (10/2) lalu.

Hadir pada rapat tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Yan Septedya, Kepala Bidang Pertanahan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), jajaran Camat, Lurah, dan Kepala Desa. Rapat membahas mengenai persiapan PTSL yang akan berlaku di Kabupaten Bogor.

Metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat: sandang, pangan, dan papan. Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Nomor 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2018.

Dalam acara tersebut, Sekda Burhanudin menjelaskan bahwa program PTSL harus dilaksanakan karena menyangkut hak rakyat, jadi PTSL harus sukses. Dengan program ini, nilai lahan meningkat, nilai ekonomisnya meningkat, jadi sertifikat itu memiliki jaminan yang tinggi bagi pemilikannya, menekan terjadinya sengketa lahan, dan dengan adanya sertifikat tersebut membuat aman pemilik lahan," jelas Burhanudin.

Burhanudin menambahkan, manfaat PTSL untuk masyarakat yaitu memberikan kepastian dan perlindungan hukum dengan cara memberikan rasa aman dan jaminan kepastian hukum mengenai subjek, objek, dan hak atas tanah. "PTSL merupakan program pemerintah yang diamanatkan dalam undang-undang Pemerintah dan masyarakat bisa berkolaborasi pada program PTSL ini. Kami berharap, adanya sertifikat membuat masyarakat menjadi makmur," tambah Burhanudin. ● **gio**

8 | Nusantara



PRODUKSI ANGKLUNG DI SAUNG ANGKLUNG UDJO

Perajin menyelesaikan produksi angklung di Saung Angklung Udjo, Bandung, Jawa Barat, Minggu (12/2). Saung angklung udjo tengah memproduksi puluhan ribu angklung untuk kebutuhan pemecahan rekor dunia bermain angklung bersama serta orkestra yang rencananya akan dilaksanakan pada awal tahun 2023.

WARGA DARI DUA KECAMATAN MENOLAK

Rencana Pembangunan TPST di Ngamprah dan Batujajar Dibatalkan

Selain mendapat penolakan warga, lokasinya pun kurang representatif.

Bahkan, untuk akses jalan terlalu sempit dan bisa menyulitkan truk saat melintas jalan tersebut, ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat (KBB), Apung Hadiat Purwoko.

NGAMPRAH (IM)

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Apung Hadiat Purwoko memastikan rencana pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) di Kecamatan

Ngamprah dan Batujajar dibatalkan.

Pembatalan tersebut dilakukan menyusul banyaknya aspirasi masyarakat dari dua kecamatan tersebut yang menolak secara tegas rencana pembangunan TPST tersebut.

BMPS Minta Penerimaan Peserta Didik Baru Berkeadilan

BOGOR (IM)- Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bogor menggelar seminar nasional pendidikan bertema "Penerimaan Peserta Didik Baru yang Berkeadilan" di aula serbaguna gedung DPRD Kota Bogor, Kecamatan Tanah Sareal pada Sabtu (11/2) sore.

Ketua BMPS Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat mengemukakan, pihaknya ingin dari kegiatan ini membumahkan sebuah persepsi yang sama bahwa tujuan pendidikan yang dilaksanakan sekolah negeri maupun swasta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Sebetulnya makna berkeadilan itu bisa kita pahami bahwa ingin dari seminar ini menghasilkan sebuah persepsi yang sama, bahwa sekolah negeri dan swasta sama merupakan dua lembaga tempat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa," ungkap Ade usai seminar.

Ade menerangkan, jika menyimak data di Kota Bogor, semisal pada SMP negeri saat ini berjumlah 20 sekolah. Sementara kondisi pada kelas 6 SD sekarang sekitar 18 ribu peserta didik. Jika mengandalkan sarana yang ada di 20 SMP negeri kali 9 rombel kali 32 siswa berarti hanya mampu

mewadahi 5.750 siswa. "Artinya, 13 ribu sekian di mana kalau bukan di SMP swasta. Jadi itulah kenapa adanya SMP swasta, sebagai lembaga tempat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa," tuturnya.

Ade memaparkan, apabila peserta didik itu tidak diterima di sekolah swasta yang disebut sekolah elit. Artinya, ada hak pendidikan seorang warga negara tidak terwadahi. Oleh karena itu, BMPS Kota Bogor akan menyampaikan rumusan dari hasil pertemuan dalam seminar ini ke tingkat provinsi Jawa Barat dan juga pusat.

"Saya minta untuk disampaikan juga rumusannya ke provinsi, dan ke nasional karena sudah dikomunikasikan dengan dirjen oleh panitia," papar mantan Sekda Kota Bogor ini.

Ade menjelaskan, selain itu, pertemuan ini juga menjadi bahan untuk kepentingan di Kota Bogor sendiri dalam rangka membuat regulasi yang ada keberpihakan kepada semua pihak.

"Mudah-mudahan dari pertemuan hari ini semua bisa melihat atau menempatkan bahwa sekolah swasta dan negeri sama saja. Seminar ini

merupakan salah satu program kerja kepengurusan BMPS Kota Bogor periode 2022-2027 setelah pelantikan di Desember 2022. Mudah-mudahan lima program lain bisa dilaksanakan dengan tujuan manfaat untuk kepentingan anggota. Karena sejatinya bahwa keberadaan organisasi itu harus manfaat untuk anggota, bukan organisasi," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik), Sujatmiko Baliarto mengatakan, BMPS Kota Bogor memberikan masukan dalam hal pelaksanaan PPDB Kota Bogor, yaitu diminta jalur afirmasi siswa kurang mampu ditambah.

"Hal itu dimaksudkan agar sekolah negeri lebih banyak menampung siswa kurang mampu. Tentu yang terpenting adalah PPDB akan digelar secara berkeadilan dan transparan tanpa adanya penyimpangan. On the track," pungkasnya Sujatmiko.

Kegiatan juga dibuka oleh Wali Kota Bogor Bima Arya yang didampingi Kepala Disdik Sujatmiko Baliarto. Selain itu hadir pula pihak Kantor Cabang Dinas Pendidikan (KCD) Wilayah II, BPJS Ketenagakerjaan dan Bank Jabar Banten (BJB) selaku sponsor. ● **gio**



PAMERAN HAUS BUKU DI BANDUNG

Pengunjung mengamati koleksi buku pada pameran Haus Buku di Perpustakaan Ajip Rosidi, Bandung, Jawa Barat, Minggu (12/2). Pameran yang memamerkan koleksi buku sejarah, fiksi, ilmiah dan surat-surat dari pengarang tersebut digelar untuk meningkatkan minat baca masyarakat ditengah disrupsi digital.

"Selain mendapat penolakan warga, lokasinya pun kurang representatif. Bahkan, untuk akses jalan terlalu sempit dan bisa menyulitkan truk saat melintas jalan tersebut," ujar Apung kepada wartawan.

Ia menyebut, pihak DPRD KBB juga sudah melakukan survei lokasi dan memang dinyatakan kurang layak lantaran banyak melewati permukiman penduduk dan rentan memicu penolakan.

Ia pun mengakui, proyek yang didanai oleh Bank Dunia tersebut tak cukup hanya mendapat persetujuan DLH KBB. Namun, juga bupati dan DPRD KBB. "Ketika TPST itu jadi diban-

gun, pada tahun pertama operasional masih ditanggung APBN, tahun kedua oleh APBD, kemudian tahun ketiga dikelola oleh BUMDes," ujarnya.

Hasil hitungan, sambung dia, untuk sarana prasarana saja butuh anggaran Rp 17 miliar ditambah Rp 1 miliar untuk operasional per tahun.

"Karena anggarannya terlalu besar sehingga dianggap bisa membebani APBD," ucapnya.

Rencananya, sebut dia, TPST tersebut dapat mengolah sampah menjadi briket atau RDF (Refuse Derived Fuel) yang dimanfaatkan untuk bahan bakar pabrik sampai maggot atau belatung sebagai pakan ikan.

"Hitung-hitungan, hasil dari produksi berupa briket dan maggot untuk tahap awal tidak akan menutup untuk Sarpras dan operasional," sebutnya.

"Tapi Insya Allah jika APBD kita sudah mampu, TPST bisa dibangun di KBB," imbuhnya.

Ia mengungkapkan, TPST sangat dibutuhkan oleh KBB lantaran sebagai antisipasi ditutupnya TPA Sarimukti.

"Tapi khusus di Cikupa hanya untuk melayani tiga desa yaitu, Cilame, Ngamprah, dan Mekarsari, serta sampah dari perkantoran Pemkab Bandung Barat," ungkapnya. ● **pra**

TAK SEMUA WARGA MILIKI SMARTPHONE

Pemkot Bogor Khawatirkan Perubahan KTP Digital ke IKD

BOGOR (IM)- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor merespons rencana Pemerintah Pusat yang bakal menghentikan secara bertahap distribusi blanko KTP-el dan menggantinya dengan identitas kependudukan digital (IKD).

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor, Ganjar Gunawan, menyampaikan kekhawatirannya terkait rencana tersebut.

Kekhawatiran Ganjar muncul lantaran tidak semua warga Kota Bogor sudah memiliki ponsel atau ponsel pintar. Sedangkan IKD dioperasikan melalui ponsel pintar.

"TKD memang kan aplikasi di smartphone (ponsel pintar) dan pasti tidak semua warga punya smartphone. Jadi pekerjaan rumah (PR) Pemerintah Pusat ke depannya," Ganjar kepada wartawan, Sabtu (11/2).

Namun demikian, kebijakan pemerintah pusat terkait dengan penggantian blanko KTP-el ke IKD sendiri akan dilaksanakan secara bertahap. Dimana target nasional yakni sekitar 25 persen dari penduduk wajib KTP atau sekitar 50 juta penduduk.

"Itu diimbau bisa terafiliasi dengan aplikasi IKD di smartphone masing-masing, di mana saat ini masih di layanan berbasis Android," ucap Ganjar.

Menurut dia, Pemkot Bogor sendiri menargetkan sekitar 200 ribu penduduknya didorong dapat bermigrasi ke aplikasi IKD, dengan memiliki KTP digital. Ganjar menjelaskan, saat ini baru ada sekitar 3.000 warga yang sudah mendaftar KTP digital dari total target 200 ribu penduduk.

"Kota Bogor sendiri sebenarnya sudah memulai, dengan target pertama adalah di lingkup instansi pemerintah dulu, untuk memudahkan sosialisasi, dan nanti akan kita masifkan ke masyarakat luas," ujarnya. Diketahui, Pemerintah

Pusat bakal menghentikan secara bertahap distribusi blanko KTP-el dan menggantinya dengan KTP digital. Hal itu dilakukan sebagai langkah menggantikan penerbitan KTP-el yang masih banyak dikeluhkan masyarakat.

Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrullah menyebutkan terdapat tiga kendala pencetakan KTP-el. "Pengadaan blanko KTP-el mengambil porsi cukup besar anggaran Dukcapil. Kemudian harus pula menyediakan printer dengan ribbon, cleaning kit dan film. Belum lagi masalah kendala jaringan internet di daerah," kata Zudan dalam keterangannya, Jumat (10/2).

Menurut Zudan, jika terdapat kendala jaringan, pengiriman hasil perekaman KTP-el tidak sempurna. Alhasil, KTP-el tidak jadi, karena terdapat permasalahan sistem. Bahkan, perekaman sidik jari pun gagal karena tidak ter kirim ke pusat.

"Mengatasi kendala jaringan, ditambah pengadaan peralatan dan blanko itu mahal sekali. Maka Pak Mendagri Tito Karnavian memberikan arahan agar menggunakan pendekatan asimetris, yakni dengan digitalisasi dokumen kependudukan termasuk penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD)," jelas Zudan.

Belum lagi, lanjut Zudan, ada pemekaran 11 kecamatan, 300 desa/kelurahan terutama di daerah otonomi baru (DOB) di Papua. "Jadi kita tidak lagi menambahkan blanko KTP-el, tetapi kita mendigitalkan pelayanan administrasi. KTP elektronik diganti KTP digital," ujarnya.

Zudan menjelaskan, Dukcapil menargetkan sebanyak 25 persen dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) tahun ini. Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten/kota di Indonesia. ● **gio**